BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Profil Masyarakat Pedesaan

5.1.1 Keadaan Umur Petani di Pedesaan

Keberhasilan suatu usaha di pedesaan sangat ditentukan oleh umur pelaku usaha itu sendiri. Umur menunjukkan kemampuan melakukan kegiatan terutama sector pertanian. Di pedesaan umur identik dengan tenaga yang akan dicurahkan dalam kegaiatan usatani, karena terkait dengan tenaga dan otot. Kegiatan usahatani sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan pelakunya. Hal tersebut disebabkan petani jauh berbeda dengan pelaku usaha di sector industry dan jasa, dimana sector jasa dan industry lebih dituntuk penggunaan otak (skill) dibandingkan dengan petani di pedesaan lebih dituntut kekuatan otot. Untuk itu kondisi umur pada usahatani lebih berpengaruh dalam aktivitas pertanian.

Apabila dilihat keadaan umur petani sampel di pedesaan tergambar bahwa rataan umur untuk petani 41,96 tahun. Sebagian besar petani di pedesaan berusia antara 26-53 tahun. Kondisi ini akan dapat meningkatkan produktivitas usahatani bagi keluarga tani, karena petani yang melakukan usatataninya pada usia produkstif. Untuk lebih jelasnya gambaran keaadaan umur petani sampel di pedesaan disajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1 Keadaan Umur Petani Sampel di Pedesaan (tahun)

Petani Perkebunan			Petani Nonperkebunan		
Umur Petani	Frekuensi	%	Umur Petani	Frekuensi	%
18 - 26	12	5.41	20 - 27	9	7.76
27 - 35	44	19.82	28 - 36	41	35.34
36 - 44	59	26.58	37 - 45	36	31.03
45 - 53	65	29.28	46 - 54	18	15.52
54 - 62	42	18.92	55 - 63	12	10.34
Jumlah	222	100.00	Jumlah	116	100.00
Rataan umur	43,34			39,49	
	41,96				

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

5.1.2 Tanggungan Keluarga Petani Pedesaan

Jumlah anggota keluarga sangat menentukan beban ketergantungan ekonomi di pedesaan. Dari Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa rataan jumlah tanggungan keluarga untuk petani perkebunan sebesar 3,37 dan petani non perkebunan sebesar 3,55. Apabila ditinjau secara keseluruhan rataan jumlah tanggungan sebesar sebesar 3,4. Ini berarti bahwa setiap kepala keluarga menanggung jaminan hidup anggotanya sebanyak 3,4 orang per kepala keluarga. Dari Tabel 5.2 juga terlihat bahwa jumlah keluarga yang mempunyai tanggungan lebih dari 5 orang sebesar 12,61% untuk kelompok petani perkebunan dan sebesar 17,24% bagi petani nonperkebunan. Namun dari sisi lain juga terlihat bahwa ada sekitar 3-4% petani yang belum mempunyai tanggungan selain dari istrinya, ini menunjukkan bahwa petani tersebut belum menikah atau belum mempunyai anak, atau tidak ada anggota keluarga yang menjadi tanggungan petani tersebut.

Tabel 5.2 Gambaran Jumlah Anggota Keluarga Sampel (jiwa)

Petani Perkebunan			Petani Nonperkebunan		
Anggota Kel.	Frekuensi	%	Anggota Kel.	Frekuensi	%
0	7	3.15	0	4	3.45
1	14	6.31	1	9	7.76
2	49	22.07	2	20	17.24
3	54	24.32	3	24	20.69
4	49	22.07	4	20	17.24
5	21	9.46	5	19	16.38
6	15	6.76	6	11	9.48
7	13	5.86	7	9	7.76
Jumlah	222	100.00	Jumlah	116	100.00
Rataan Anggota Keluarga	3.37			3.55	
	3,4				

Besarnya jumlah tanggungan kepala keluarga akan menyebabkan beban hidup yang ditanggung oleh kepala keluarga menjadi besar, dan beban ketergantungan juga tinggi. Pada umumnya mereka yang mempunyai jumlah tanggungan yang besar itu adalah petani yang mempunyai lahan pertanian yang luas. Hal tersebut disebabkan karena ada curahan tenaga kerja keluarga pada kegiatan pertanian tersebut. Tingginya jumlah tanggungan kepala keluarga

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

bukan disebabkan karena mereka mempunyai anak yang banyak, tetapi pada umumnya mereka membawa anggota keluarga yang berasal dari kampung halaman mereka seperti mertua, adik, adik ipar, keponakan. Hal ini juga akan menyebabkan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di daerah pedesaan.

5.1.3 Pendidikan Kepala Keluarga

Dari hasil data lapangan ditinjau dari aspek pendidikan sampel, dapat diungkapkan bahwa kualitas sumberdaya petani masih rendah. Berikut ini disajikan pada Tabel 5.3 tentang lama pendidikan yang ditempuh oleh petani.

Tabel 5.3 Gambaran Lama Pendidikan Kepala Keluarga Sampel (tahun)

Petani Perkebunan			Petani Nonperkebunan		
Lama Pendidikan	Frekuensi	%	Lama Pendidikan	Frekuensi	%
0 - 3	42	18.92	0 - 3	26	22.41
4 - 7	91	40.99	4 - 7	15	12.93
8 - 11	48	21.62	8 - 11	35	30.17
12 - 15	36	16.22	12 - 15	21	18.10
16 - 19	5	2.25	16 - 19	19	16.38
Jumlah	222	100.00	Jumlah	116	100.00
Rataan lama pendidikan	6.77			7.86	
	7,11				

Rataan lama pendidikan sampel 7,11 tahun atau sebagian sampel berpendidikan sederajat SLTP. Rendahnya tingkat pendidikan petani akan berakibat lambatnya penerapan perubahan teknologi. Pada umumnya keterampilan lebih mudah ditingkatkan apabila pendidikan semakin tinggi. Pentingnya pendidikan tersebut bagi petani supaya dapat dengan mudah meningkatkan keterampilannya dan mengarah kepada keahlian, sehingga nanti akan dapat meningkatkan produktivitas baik petani maupun lahan mereka.

5.1.4 Pemilikan Lahan Pertanian di Pedesaan

Bagi masyarakat pedesaan sumber mata pencaharian pokok bersumber dari kepemilikan factor produksi terutama dari sumberdaya lahan. Berbeda dengan ekonomi perkotaan (industry dan jasa) mereka memiliki factor produksi berupa modal, skill, dan tenaga kerja. Kalau diamati di pedesaan yang dimiliki

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

oleh masyarakat pedesaan tenaga kerja dan sebagian memiliki lahan, tapi khusus untuk mereka yang bukan usaha pokoknya dari sector pertanian kepemilikan lahan hanya rataan seluas 0,47 ha. Sedangkan bagi petani yang berusaha di sector perkebunan kepemilikan rataan lahan seluas 2,62 ha. Untuk ukuran di pedesaan luas lahan 2,62 ha seharusnya sudah dapat menjamin kehidupan layak di pedesaan. Penyebaran kepemilikan lahan di pedesaan disajikan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Kepemilikan Lahan bagi Petani Sampel

Perkebunan			Nonperkebunan		
Luas Lahan	Frekuensi	%	Luas Lahan	Frekuensi	%
0.5 - < 2.0	56	25.23	0.03 - <0.40	60	51.72
≥ 2.0 - < 4.0	102	45.95	≥0.40 - <0.80	37	31.90
≥ 4.0 - < 6.0	43	19.37	≥0.80 - <1.20	10	8.62
≥ 6.0 - < 8.0	11	4.95	≥1.20 - <1.60	6	5.17
≥ 8.0 - < 10.0	10	4.50	≥1.60 - 2.00	3	2.59
Jumlah	222	100.00	Jumlah	116	100.00
Rataan pemilikan	2.62			0.47	
	1.93				

Dari tabel tersebut terlihat bahwa untuk usahatani perkebunan pemilikan lhan yang kecil dari 2 ha sebanyak 25,23%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa lebih dari 25% petani tidak memiliki lahan yang layak untuk jaminan kehidupan keluarganya. Dari sisi masyarakat non perkebunan terlihat bahwa semua sampel pemilikan lahan kecil dari 2 ha. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sumber pendapatan utamanya bukan dari sector perkebunan. Bentuk usahatni mereka ini lebih banyak pada sector pangan dan tanaman palawija.

Kepemilikan lahan yang luas identik dengan tingginya pendapatan masyarakat petani, namun kondisi ini hanya berlaku bagi petani kelapa sawit. Bagi petani kelapa sawit akan memberikan produksi yang tinggi dari lahan yang mereka miliki, sehingga pendapatn mereka juga tinggi. Hal tersbut disebabkan karena pasar dari hasil kebun kelapa sawit lebih terjamin. Berbeda dengan petani kelapa, walaupun pemilikan lahan cukup luas, tapi ini tidak menjamin tingkat pendapatan yang tinggi, hal tersebut disebabkan kondisi perkebunan kelapa di daerah penelitian tidak memberikan harapan yang baik, antara lain

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

disebabkan: 1) harga produksi kelapa (kopra) lebih banyak ditentukan oleh pihak pembeli (di daerah survey diistilahkan toke), keadaan pasar kopra lebih bersifat monopsoni (pembeli tunggal). Kondisi pasar ini sangat tidak menguntungkan petani kelapa; 2) panen kelapa dilakukan setiap tiga bulan sekali, sedangkan petani kelapa sawit setiap minggu. Jarak panen tersebut sangat dirasakan oleh petani kelapa karena terkait dengan penerimaan hasil panen yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga; 3) selama tenggang waktu panen tersebut petani melakukan pinjaman kepada toke berupa uang tunai atau kebutuhan harian keluarga (disini toke kadang berperan sebagai pedagang kebutuhan harian di pedesaan). Keadaan tersebut menyebabkan tingkat ketergantungan petani dengan toke sangat tinggi. Dan sebaliknya bagi si toke merupakan kekuatan pula untuk menekan harga kopra dari pihak petani. Sehingga petani kelapa merupakan pihak yang lemah di pedesaan.

5.1.5 Tingkat Pendapatan Petani di Pedesaan

Tingkat kesejahteraan petani dipedesaan sangat ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dari hasil usahatani yang dilakukan. Pada Tabel 6.5 disajikan tingkat pendapatan petani di pedesaan. Dari table tersebut terlihat bahwa pendapatan petani perkebunan yang dibawah Rp 1.000.00 hanya sebesar 16,22%. Semetara dari petani nonperkebunan sebesar 32%. Begtu juga pendapatan yang diatas Rp 4.000.000 petani perkebunan sebsar 12,16% dan petani non perkebunan hanya sebesar 2,59%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa petani perkebunan mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari petani nonperkebunan.

Dari sisi rataan pendapatan petani perkebunan sebesar Rp 1.928.739 per bulan dan petani non perkebunan sebesar Rp 1.327.379. Kondisi ini ini juga memberikan gambaran bahwa petani perkebunan juga memperlihatkan pendapatan yang tinggi. Tentu saja ini terkait dengan kesejahteraan keluarga, terutama pemenuhan kebutuhan hidup.

Jika dilihat masing-masing jenis usahatani tani memberikan gambaran bahwa petani kelapa sawit mempunyai tingkat pendapatan yang tinggi yakni

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

rataan Rp 2.830.550, sedangkan petani kelapa hanya sebesar Rp 1,133,789. Perbandingan dari kedua jenis usahatani ini sebesar 2,5. Kondisi ini juga memberikan gambaran bahwa kelapa sawit merupakan usahatani yang memberikan harapan terhadap perubahan nasib masyarakat pedesaan. Petani mempunyai pendapatan sekitar 2,5 kali lipat pendapatan petani kelapa.

Tabel 5.5 Tingkat Pendapatan Petani Sampel di Pedesaan

Tingkat Pendapatan (Rp)	Petani Perkebunan		Petani Nonperkebunan	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
< 1.000.000	36	16.22	38	32.76
≥ 1.000.000 - < 2.000.000	104	46.85	57	49.14
≥ 2.000.000 - < 3.000.000	37	16.67	15	12.93
≥ 3.000.000 - < 4.000.000	18	8.11	3	2.59
≥ 4.000.000	27	12.16	3	2.59
Jumlah	222	100.00	116	100.00
Rataan Pendapatan petani	1,928,739		1,327,379	
Rataan petani kelapa	1,133,789			
Rataan petani kelapa sawit	2,830,550			

Tingginya pendapatan petani kelapa sawit dibandingkan dengan pendapatan petani kelapa memberikan dampak terhadap animo masyarakat pedesaan untuk berusahtani kelapa sawit. Kondisi ini dapat dilihat di lapangan bahwa banyak petani kelapa sudah mulai mengkonversi kebun kelapa menjadi kebun kelapa sawit dengan cara penyisipan diantara pohon kelapa. Secara bertahap akan terjadi pengalihan alih fungsi lahan dari kebun kelapa ke kebun kelapa sawit. Faktor ini lebih disebabkan karena usahatani kelapa sawit lebih memberikan jaminan kehidupan melalui ketersediaan pasar produksi kebun. Dari sisi lain petani menyadari bahwa harga komoditas kelapa sawit berupa TBS (tandan buah sawit) lebih terjamin dan tingkat fluktuasi yang kecil, sedangkan harga kelapa (kopra) sangat berfluktuasi bahkan dengan tingkat distorsi harga yang tajam.

5.1.6 Tingkat Pengeluaran Petani di Pedesaan

Pendapatan yang diperoleh dari usahatani di pedesaan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga petani di pedesaan. Dari

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

data hasil survey memperlihatkan perbedaan pengeluaran antara petani perkebunan dengan petani nonperkebunan. Rataan pengeluaran petani perkebunan sebesar Rp 1.638.966 per bulan dan petani nonperkebunan sebesar Rp 1.197.974 per. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan pendapatan yang mereka peroleh. Pendistribusian tingkat pengeluaran dari petani sampel disajikan pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6 Tingkat Pengeluaran Petani Sampel di Pedesaan

Tingkat Pengeluaran	Petani Perkebunan		Petani Nonperkebunan	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
≥500.000-<1.000.000	57	25.68	50	43.10
≥1.000.000-<2.000.000	98	44.14	54	46.55
≥2.000.000-<3.000.000	43	19.37	6	5.17
≥3.000.000-<4.000.000	11	4.95	3	2.59
≥4.000.000	13	5.86	3	2.59
Jumlah	222	100.00	116	100.00
Rataan Pengeluaran petani	1,638,966		1,197,974	
Pengeluaran petani kelapa	1,041,050			
Pengeluaran petani kelapa sawit	2,305,960			

Apabila diamati besar pengeluaran dari petani perkebunan menunjukkan bahwa pengeluaran petani kelapa sawit melebihi Rp 2 juta per bulan, sedangkan petani kelapa hanya sekitar Rp 1 juta per bulan. Besar kecilnya pengeluaran ini juga sebagai indicator kesejahteraan yang mereka rasakan di pedesaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa petani kelapa sawit lebih sejahtera dibandingkan dengan petani kelapa di pedesaan. Kecilnya pengeluaran petani kelapa juga disebabkan karena masukan dari hasil usahatani juga keci; Ini sudah barang tentu juga memberikan gambaran bahwa tingkat kepuasan keluarga juga terbatas dari sisi ekonomi.

5.2. Penduduk dan Keluarga Miskin

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Riau (2009) di Kabupaten Indragiri Hilir ditemukan sebanyak 46,235 (32,7%) keluarga miskin dari jumlah keluarga yang ada sebanyak 141,385 KK. Dari jumlah tersebut jumlah penduduk miskin sebanyak 199,452 jiwa (31,94%).

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Untuk lebih jelasnya penyebaran keluarga dan penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir disajikan pada Tabel 5.7. Untuk lebih rincinya data per desa disajikan pada Lampiran 2.

Berdasarkan Tabel 5.7, kecamatan Teluk balengkong dan Kecamatan kemuning merupakan persentase jumlah keluarga miskin. Namun secara kuantitas jumlah keluarga miskin terdapat di Kecamatan Mandah sebanyak 3,988 keluarga. Apabila diamati kemiskinan di pedesaan tersebut mata pencaharian pokok masyarakat adalah berkebun kelapa. Ketergantungan tehadap hasil kebun sangat tinggi. Sebagian masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir sumber mata encaharian dari kebun Kelapa, kecuali untuk wilayah Barat sebagian besar berusaha tani kelapa sawit. Mereka yang sumber mata pencaharian dari usahatani kelapa memperlihatkan tingkat pendapatan yang rendah, pada saat survey hasil penjualan kopra di tingkat petani berara pada posisi tingkat yang sangat rendah yakni Rp 150.000 per kwintal. Apabila seorang keluarga tani menghasilkan kopra sebesar 2 ton per tiga bulan, maka hasil penjualannya hanya sebesar Rp 3.000.000 per tiga bulan atau sebesar Rp 1.000.000 per bulan.

Selama menunggu masa panen (waktu tiga bulan) pada umumnya petani di pedesaan sangat tergantung kepada sang toke. Petani di pedesaan tidak mempunyai kekuatan untuk menjual kopranya kepada toke lain, hal tersebut disebabkan petani telah berutang (berupa uang tunai dan kebutuhan harian) kepada toke desa. Keadaan ini membuat petani kelapa di pedesaan tidak bisa keluar dari cengkaraman toke di desa. Semuanya berdampak terhadap penekanan harga atau penentuan harga sepihak oleh pihak toke. Kalau ini masih berlanjut maka petani kelapa di pedesaan tidak akan terangkat dari kemiskinan yang berkelanjutan. Guna mengatasi semua masalah petani dipedesaan perlu kebijakan pemerintah, antara lain: 1) ada jaminan pasar bagi petani melalui koperasi; atau 2) disediakan subsidi harga bagi petani kepala. Subsidi harga jauh lebih baik dibandingkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat pedesaan.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

5.3. Potensi Pengembangan Koperasi

5.3.1 Kemitraan dalam Koperasi

Dalam suasana persaingan yang semakin kompetitif, keberadaan usaha koperasi dituntut untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya, karena lembaga ini dianggap cukup repsentatif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Langkah kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan suatu strategi untuk dapat mengembangkan usaha koperasi dan secara moril kerjasama ini sangat diperlukan adanya dukungan yang maksimal dari pihak pengusaha besar melalui paket pembinaan. Harus diakui usaha koperasi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan, baik dari segi permodalan, sumberdaya manusia, manajemen, minimnya penguasaan teknologi informasi, iklim berusaha, dan distribusi jasa/produk yang dihasilkan (Almasdi Syahza, 2004a)

Alternatif pemberdayaan koperasi di daerah adalah melalui konsep mekanisme kerjasama atau keterkaitan dengan perusahaan besar dalam bentuk kemitraan usaha. Konsep ini telah mulai ditawarkan sejak tahun 1980 dan dicanangkan melalui gerakan kemitraan usaha nasional (GKUN) pada tahun 1996. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan yang terjadi antara usaha kecil menengah yang sebagian besar memayungi masyarakat miskin dengan BUMN dan BUMS.

Konsep kemitraan merupakan bagian tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya sesuai dengan konsep manajemen berdasarkan sasaran atau partisipatif. Perusahaan besar harus bertanggungjawab mengembangkan usaha kecil dan masyarakat pelanggannya, karena pada akhirnya konsep kemitraan yang dapat menjamin eksistensi perusahaan besar terutama untuk jangka panjang. Setiap pihak yang bermitra dengan koperasi, baik sebagai pionir maupun sebagai mitra, tidak hanya dilakukan sebagai belas kasihan oleh yang kuat terhadap yang lemah, tetapi kemitraan seyogyanya terjalin kinerja karena kehendak bisnis yang dibarengi dengan rasa tanggung jawab sosial yang kuat.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

masing jenis usaha atau kegiatannya. Koperasi dengan manajemen yang baik menjalin kerjasama dalam bentuk mitra kerja dengan lembaga keuangan dan perusahaan. Dari ketiga komponen mitra (koperasi, perusahaan, dan lembaga keuangan) perlu dukungan dari pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Pemerintah sifatnya disini hanya sebagai pemberian jasa berupa pembinaan dan penyuluhan. Untuk lebih jelasnya bentuk mitra kerja koperasi disajikan pada Gambar 5.1.

5.3.2 Partisipasi dan Manfaat Koperasi

Tujuan utama mendirikan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat daerah sekitar pada umumnya. Namun tujuan tersebut sangatlah abstrak, oleh sebab itu, tujuan yang lebih kongkrit adalah promosi ekonomi anggota. Promosi ekonomi anggota dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan manfaat atau pelayanan secara optimal pada anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Koperasi dibentuk oleh kelompok-kelompok orang yang mengelola perusahaan koperasi secara bersama-sama, dan diberi tugas untuk menungjang kegiatan ekonomi para anggotanya. Setiap kelompok orang dapat merumuskan dan mewujudkan tujuan-tujuan secara bebas melalui kegiatan-kegiatan ekonomi secara bersama.

Dengan demikian keberhasilan koperasi tidak hanya cukup dengan partisipasi kontributif, tetapi lebih penting adalah partisipasi insentif dari koperasi bagi anggotanya. Peningkatan partisipasi dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) para anggota. Hal ini merupakan ciri utama koperasi yang membedakannya dengan organisasi lain (non koperasi).

Disamping pengaruh faktor di atas, keberhasilan usaha koperasi juga tampaknya berhubungan erat dengan manfaat yang dirasakan oleh para anggota koperasi. Manfaat yang dirasakan akan dinilai secara subjektif oleh anggota dan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam menumbuhkan loyalitas dan partisipasi anggota koperasi untuk melibatkan diri dalam setiap aktivitas koperasi.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Pengendalian manajemen oleh anggota secara teoritis mungkin terjadi sebagaimana pendapat Roepke (2000) dalam model kesesuaian partisipasi, seperti disajikan pada Gambar 5.2.

Bila variabel anggota, manajemen, dan program menemui kesesuaian maka akan tercapai keefektifan pertisipasi anggota. Kesesuaian tersebut adalah: a) antara pelayanan yang dibutuhkan (*needs*) anggota dengan output pelayanan dari program, b) antara tugas-tugas (*task*) program dengan kemampuan (*ablity*) manajemen; dan c) antara apa-apa yang diminta (*demands*) anggota dengan keputusan (*decisions*) manajemen. Alat yang digunakan untuk mengendalikan mekanisme tercapainya kesesuaian ini adalah hak suara (*voice*), hak pilih (*vote*), dan hak keluar (*exit*).

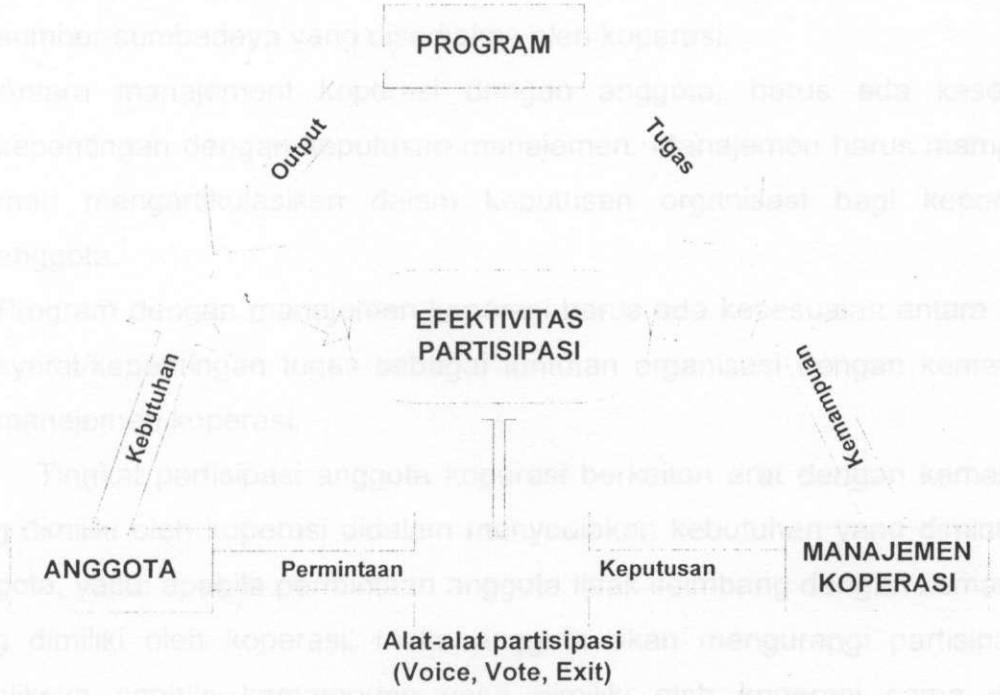

Gambar 5.2. Model Kesesuaian Partisipasi (Roepke, 2000)

Melalui model ini maka anggota akan berpartisipasi maksimal agar perusahaan koperasi bisa terwujud melalui pembiayaan (iuran anggota), memberikan pendapat, dan mengawasi jalannya perusahaan. Adanya kesesuaian tersebut berimplikasi pada pemilihan manajemen yang mampu menjalankan tugas sesuai dengan permintaan dan kebutuhan anggota, melalui

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

- Adanya sejumlah individu yang bersatu atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama (*kelompok koperasi*);
- Anggota kelompok koperasi secara individual bertekad mewujudkan tujuannya memperbaiki kondisi sosial ekonominya melalui usaha bersama dan saling membantu (*swadaya kelompok koperasi*);
- Alat untuk mewujudkannya adalah perusahaan koperasi (*perusahaan koperasi*); dan
- Perusahaan koperasi tersebut ditugasi untuk menunjang kepentingan anggota kelompok koperasi dengan cara menyediaakan dan menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para anggota dalam kegiatan ekonominya, yaitu usahatani dan rumah tangga (*prinsip promosi anggota*)

Sesuai karakteristik ini koperasi harus didukung oleh manajemen yang bersifat:

- Mampu memahami keinginan dan kebutuhan anggota sehingga dapat merumuskan tujuan anggota yang representatif untuk mewakili semua kelompok usahatani anggota;
- Mampu mengelola kemampuan swadaya anggota dalam memberi kontribusi uang, pendapat, dan pengawasan untuk mendirikan perusahaan yang bermanfaat;
- Bertanggungjawab melaksanakan pelayanan (promosi) pada anggota sesuai dengan kebutuhan anggota bagi keuntungan angota, tanpa mementingkan usaha sendiri;
- Mampu menjadi manajer agribisnis yang profesional dalam mendirikan perusahaan koperasi yang berorientasi maksimisasi output, melalui kebijakan harga yang tepat, sehingga dapat bersaing di pasar dan memberi keuntungan langsung pada anggota maupun keuntungan tahunan (sisa hasil usaha); dan
- Bagi daerah pedesaan, manajer harus membangun perusahaan koperasi menjadi perusahaan agribisnis dengan memahami ciri agribusiness.

Supaya koperasi di pedesaan dapat berkembang sebagai badan usaha di pedesaan, koperasi tersebut harus menunjukkan ciri-cirinya, antara lain (Downey dan Erickson, 1987):

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

- kegiatan agribisnis mulai dari: a) pasokan faktor produksi (bibit, pupuk, pestisida, dan peralatan pertanian); b) proses produksi pertanian (pengolahan tanah, pemupukan dan pemeliharaan, panen); c) proses pasca panen (penjemuran, penggilingan, pemipilan, penyortiran, pengemasan, agroindustri, pergudangan, pengangkutan); d) proses pemasaraan (pedagang perantara, pedagang besar, pasar pemerintah, pengecer); dan e) lembaga keuangan;
- banyaknya perusahaan agribisnis yang akan menjadi pesaing maupun mitra;
- perusahaan agribisnis dikelilingi oleh petani dengan produk beraneka macam;
- perusahaan agribisnis dapat berukuran kecil (peorangan) sampai ukuran raksasa ;
- banyaknya perusahaan agribisnis menyebabkan persaingan bebas
- perusahaan agribisnis berorientasi pada keluarga petani;
- perusahaan agribisnis berorientasi pada masyarakat banyak sampai pelosok;
- sering timbul masalah fluktuasi musim yang berpengaruh pada produksi;
- sangat dipengaruhi bencana alam seperti banjir, kekeringan, gempa bumi, longsor;
- kebijakan pemerintah sangat berpengaruh pada kinerja agribisnis, seperti kebijakan harga dasar gabah atau harga pupuk.

Memahami hal ini, bagi koperasi yang berkembang di daerah pedesaan, dimana anggotanya lebih dominant petani, maka perusahaan koperasi harus dinamis dalam mengantisipasi fluktuasi produksi, perubahan musim, adanya bencana, bentuk produk pertanian yang beraneka dan cepat rusak, dan produsennya (anggotanya) adalah petani yang seringkali membutuhkan uang untuk rumahtangganya. Untuk itu diperlukan integrasi vertikal, sesuai subsistem agribisnis dimana ke atas anggota sebagai pemilik unit usaha pemasok faktor produksi dan kredit konsumsi, serta kebawah anggota sebagai pemilik unit usaha pengolahan hasil produksi (agroindustri) dan unit usaha pemasaran hasil produksi, sehingga sangat efisien dan memberikan keuntungan pada anggota.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

- Promotor mengarahkan anggota untuk melakukan mekanisme demokrasi satu orang satu suara dalam memilih manajemen dan memutuskan tujuan sesuai kebutuhan;
- Khusus untuk pemilihan pengelola/manajer selama koperasi masih kecil maka cukup oleh pengurus, jika sudah besar perlu disewa manajer yang mengerti masalah agribisnis, misalnya sarjana lulusan sosial ekonomi pertanian atau Ikopin; dengan otoritas yang disepakati dan transparan melalui perjanjian;
- Diperlukan pemberdayaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga melalui pemahaman oleh manajemen dan anggota, serta perjanjian tertulis dari manajemen untuk melaksanakan ketentuan tersebut;
- Menempatkan perguruan tinggi sebagai pensihat (pelindung); dan
- Menghindari campur tangan elit desa, elit kecamatan, dan elit kabupaten; dengan cara mau menerima bantuan pemerintah (jika ada) tanpa syarat, secara tertulis.

5.4 Strategi Pengembangan Koperasi

Pengembangan koperasi tidak terlepas dari perkembangan usaha masyarakat terutama bagi masyarakat ekonomi lemah. Sebagian besar koperasi yang ada baik di kota maupun di daerah pedesaan jenis usahanya lebih dominan berupa simpan pinjam dan usaha pertanian (perkebunan). Khusus untuk jenis industri di pedesaan, pada umumnya jenis usaha yang dilakukan bersifat sederhana dalam bentuk industri rumah tangga. Pembangunan ekonomi pedesaan di masa datang tidak terlepas dari pengembangan usaha yang berbasis ekonomi pedesaan, dalam hal ini akan dikembangkan usaha kecil dan menengah (UKM). Karakteristik yang melekat pada UKM (termasuk mikro) bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang potensial, di sisi lain pada kekuatan tersebut implisit terkandung kekurangan atau kelemahan yang justru menjadi penghambat perkembangannya. Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta intereaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UKM.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah menyebabkan pemerintah dan para pengambil kebijaksanaan kembali berpikir ulang tentang arah perekonomian yang selama ini ditempuh. Kini timbul kemauan politik yang kuat untuk membenahi inefisiensi dan mis-alokasi sumberdaya (*misallocation of resources*) yang terjadi di sektor ril yang selama ini dibiarkan saja terjadi karena kuatnya *vested interest* para pemburu *rente* yang menguasai birokrasi pemerintahan. Akibat dari mis-alokasi sumberdaya adalah terabaikannya pembangunan koperasi dan industri kecil menengah (UKM) yang berbasis sumberdaya alam serta sumberdaya pertanian (*resource based industries*). Banyak industri yang dibangun yang membutuhkan bahan baku dan komponen yang harus diimpor atau industri-industri yang tidak banyak terkait dengan perekonomian lokal sehingga industri ini sangat rentan terhadap gejolak mata nilai uang. Industri-industri jenis ini pada umumnya adalah industri yang berpihak kepada golongan ekonomi kuat (Almasdi Syahza, 2003a).

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor industri kecil maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor industri kecil, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan koperasi yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya terutama di pedesaan.

Hasil pengamatan di lapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi, antara lain: 1) potensi masyarakat; 2) pengusaha; 3) lembaga perkreditan; 4) instansi terkait; dan 5) koperasi sebagai badan usaha. Rangkaian kerja dari faktor pendukung UKM tersebut disajikan pada Gambar 5.3.

Pengusaha

Pengusaha yang dimaksud disini adalah pengusaha sebagai pemilik modal dan sebagai pedagang (perantara, penyalur, pengecer). Sebagai pemilik modal menjalin kerjasama dengan koperasi dalam penyediaan sarana produksi, alat dan mesin, dan termasuk penyedia teknologi yang mendukung kegiatan

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Secara singkat konsep model agribisnis kelapa sawit yang akan melibatkan masyarakat pedesaan disajikan pada Gambar 4.6. Untuk lebih jelasnya model agroestat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

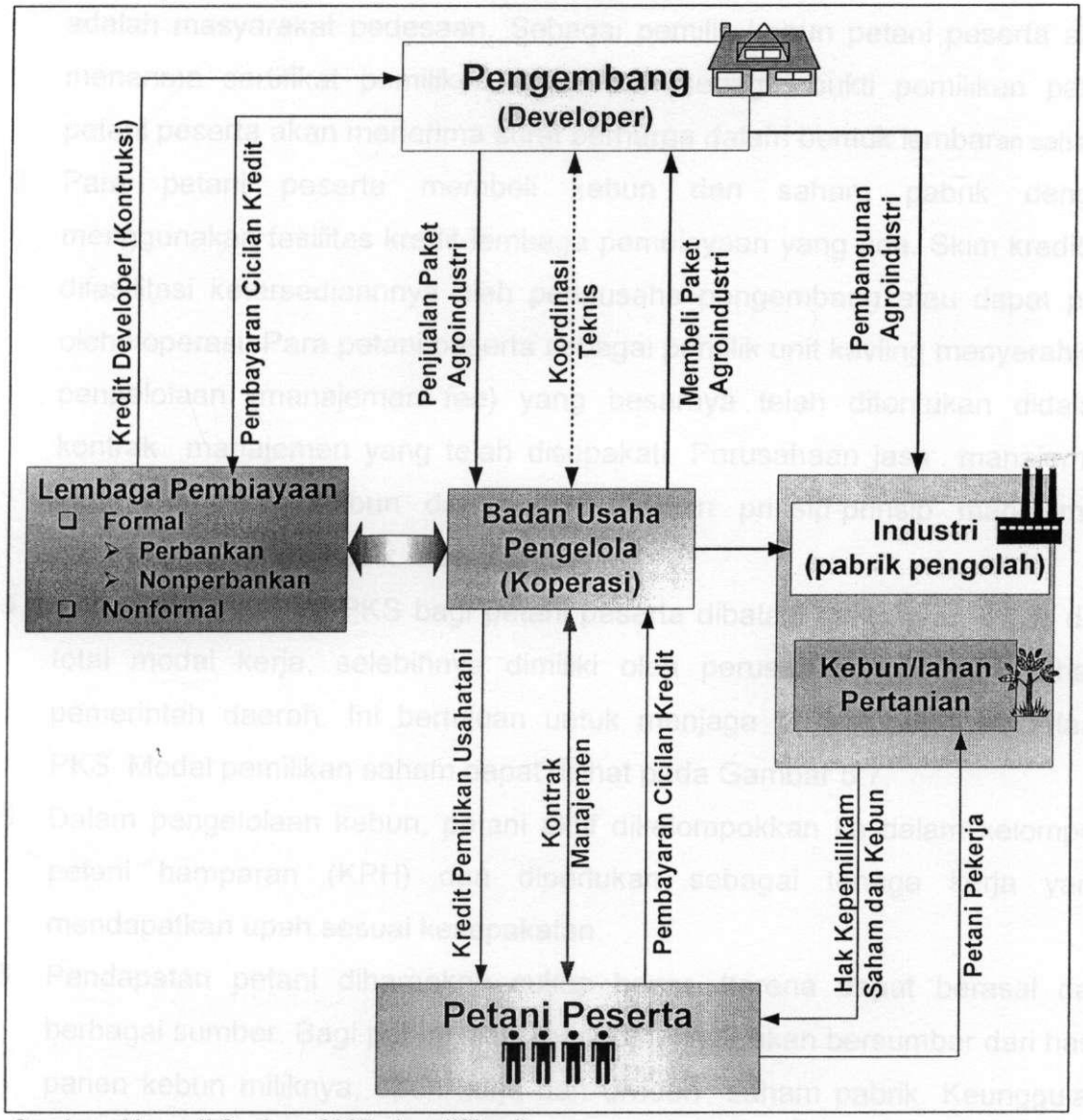

Sumber: Almasdi Syahza, 2007c (modifikasi)

Gambar 5.6. Rancangan Model Pengembangan Koperasi untuk Sektor Perkebunan di Daerah Pedesaan

1. Perusahaan pengembang (developer) membangun kebun (usahatani) dan pabrik pengolahan hasil kebun (agribisnis) sampai kebun dalam bentuk siap menghasilkan dan pabrik industri dalam bentuk siap operasi. Sumber dana untuk membangun kebun pabrik dapat menggunakan dana sendiri atau pinjaman dari bank atau pihak lain yang memungkinkan.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

(4) Melakukan negosiasi sehingga mencapai kesepakatan tentang kebutuhan dana dengan pihak perbankan atau sumber dana yang meliputi kredit untuk pembangun agroestat (usahatani, pabrik) dan kredit untuk petani peserta berupa usahatani dan saham pabrik yang telah dibangun oleh developer dengan bunga (interest) yang layak usaha (finansial).

(5) Membangun agroestat yang meliputi usahatani dan pabrik pengolahan (industri) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

(6) Merawat usahatani sampai usahatani tersebut menghasilkan.

(7) Melakukan pemasaran (penjualan) unit usahatani, saham pabrik secara paket kepada masyarakat konsumen calon petani peserta.

(8) Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Pengelola (koperasi) dalam hal ini koperasi untuk memberlakukan persyaratan teknis dan administrasi dalam proses perawatan maupun penjualan paket unit usahatani, saham pabrik pengolah (industri).

(9) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

2. *Badan Usaha Pengelola (Koperasi)*

(1) Secara umum mengikat kontrak manajemen dengan petani peserta yang di dalamnya memuat antara lain peraturan dan persyaratan sebagai berikut: a) Badan Usaha Pengelola akan mengelola agroestat secara profesional untuk kemajuan agroestat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi petani peserta; b) Penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan (fee) untuk Badan Usaha Pengelola; c) Aturan-aturan pemutusan hubungan kontrak antara Badan Usaha Pengelola dengan petani peserta; d) Perpindahan kepemilikan unit usahatani dan saham pabrik pengolahan (industri) harus sepengetahuan dan persetujuan Badan Usaha Pengelola; e) Petani peserta tidak diperkenankan merubah jenis tanaman pokok, kecuali persetujuan Badan Usaha Pengelola; f) Petani peserta menjual hasil panen usahataninya kepada pabrik pengolahan (industri) melalui Badan Usaha Pengelola; g) Petani peserta akan membayar cicilan kredit sesuai jadwal melalui Badan Usaha

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

koperasi, apakah menyangkut daya beli pasar, peluang pasar, dan lain sebagainya. Termasuk juga menyediakan tenaga ahli yang ditempatkan di koperasi. Tenaga ahli ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, apakah tenaga ahli bidang produksi, pemasaran, atau pengendali mutu.

3. Lembaga Perkreditan

Lembaga perkreditan pada kegiatan agribisnis cukup pegang peranan. Lembaga ini sebagai penyedia kredit kepada koperasi dan pengusaha. Pada model pemberdayaan ekonomi yang berbasiskan agribisnis ini, lembaga perkreditan hanya berhubungan langsung dengan koperasi dan pengusaha. Kredit disalurkan melalui koperasi di pedesaan yang sudah mempunyai bentuk usaha agribisnis dan agroindustri. Koperasi mengajukan kredit untuk modal kerja bagi anggota (petani) dan modal kerja bagi koperasi itu sendiri (sebagai pelaku agroindustri). Sementara kredit kepada pengusaha bisa saja dalam bentuk pengembangan usaha (swalayan, toko, ekspor, penyediaan teknologi, dan lain sebagainya).

4. Pengusaha tani (petani)

Kurang berkembangnya kegiatan pertanian yang berbasiskan agribisnis di pedesaan disebabkan karena beberapa hal, antara lain: tingkat pengetahuan petani, pemilikan modal, tidak adanya kepastian pasar, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Untuk mengatasi semuanya ini harus melalui suatu organisasi yang mempunyai misi sama. Koperasi di pedesaan merupakan pilihan yang paling tepat. Koperasi merupakan salah satu jaminan pasar produk pertanian di pedesaan. Oleh karena itu petani harus mengutamakan produksi komoditi unggulan di daerahnya. Petani melakukan usahanya berdasarkan perjanjian dengan pihak koperasi sebagai penyedia dana. Petani melakukan kegiatan usahataninya didampingi oleh tim ahli yang ditunjuk oleh koperasi. Dengan demikian terjadi hubungan yang erat antara koperasi dan petani. Bentuk mitra usaha ini akan memberikan beberapa keuntungan kepada petani, antara lain; 1) adanya jaminan pasar produk pertanian bagi petani; 2) petani terhindar dari resiko fluktuasi harga; 3) petani mendapat tiga keuntungan, yaitu keuntungan dari hasil penjualan produk pertanian, keuntungan dari pembagian

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

bahwa produk mereka akan ditampung. Kegiatan ini akan meransang partisipasi anggota terhadap koperasi, yang pada hakekatnya terjadi kesinambungan usaha koperasi.

Investasi yang dilakukan oleh koperasi berupa transportasi, mesin pengolah produk pertanian (agroindustri), mesin dan alat pertanian harus berupa penanaman modal atas nama anggota. Artinya setiap anggota mempunyai saham kepemilikan aset koperasi. Dengan demikia konsep agroestat di pedesaan dapat berkembang (Almasdi Syahza, 2002).

Koperasi juga berperan sebagai penyedia kredit yang diperoleh dari lembaga perkreditan dan pengusaha. Pemberian kredit ini didasarkan kepada bentuk usaha pertanian yang mengembangkan komoditi unggulan dan punya peluang pasar. Tingkat pengembalian kredit oleh petani dapat dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil pertanian kepada koperasi. Dari sisi lain Setiadi Wijaya (2002) mengungkapkan, manfaat berkoperasi: 1) membantu meningkatkan standar sosial ekonomi di daerah dengan memanfaatkan potensi dan penyerapan tenaga kerja; 2) bermanfaat langsung, karena sesuai dengan kehidupan masyarakat pedesaan; dan 3) ekonomi pedesan bisa tumbuh karena koperasi berakar kuat di pedesaan.

Koperasi sebagai unit usaha dibidang agribisnis, secara umum mencakup bidang-bidang usaha yang sangat luas yang pada prinsipnya dapat dikelompokan kepada lima komponen utama, yaitu; 1) bidang usaha yang menyediakan dan menyalurkan sarana produksi berupa alat-alat dan mesin-mesin pertanian; 2) bidang usaha dalam produksi komoditas pertanian; 3) bidang usaha industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri); 4) bidang usaha pemasaran hasil-hasil pertanian; dan 5) bidang usaha pelayanan seperti perbankan, angkutan, asuransi, atau penyimpanan.

Kegiatan unit usaha ini akan menimbulkan multiplier efek ekonomi dalam kehidupan masyarakat, pada hakekatnya agribisnis sebagai unit usaha dapat menciptakan peluang usaha dalam kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan naiknya pendapatan mayarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Dari sisi lain produk pertanian di pedesaan juga mengalami masalah pemsaran. Hal ini disebabkan karena keterbatasan informasi pasar dan kualitas produk pertanian itu sendiri. Guna mengatasi masalah pemasaran produk pertanian yang dialami oleh petani, maka perlu dipikirkan paradigma baru dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu alternatif pemecahannya adalah memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi.

Untuk mengembangkan usaha agribisnis skala kecil perlu dibentuk koperasi. Tanpa koperasi tidak mungkin agribisnis kecil dapat berkembang. Koperasi inilah yang akan berhubungan dengan pengusaha besar (Bungaran Saragih, 2001b). Melalui koperasi masalah yang dihadapi oleh petani dapat teratasi. Paradigma baru pemasaran produk pertanian yang berbasis agribisnis dapat dilihat pada gambar peraga yang disajikan (Gambar 5.9).

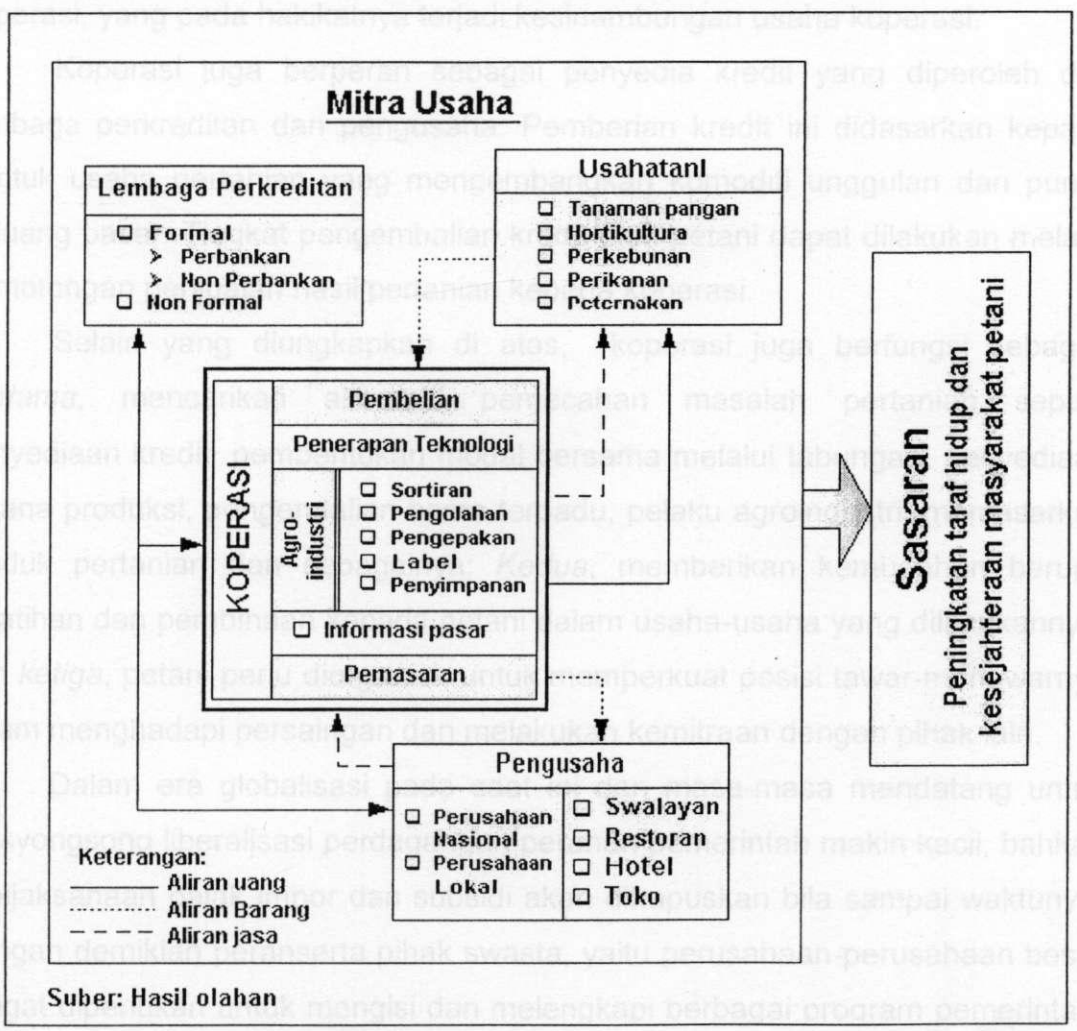

Gambar 5.9. Model Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Koperasi merupakan badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh subsistem agribisnis. Dari sisi lain koperasi juga merupakan pedagang perantara dari produk pertanian yang dihasilkan oleh anggotanya. Koperasi berfungsi sebagai lembaga pemasaran dari produk pertanian. Dalam koperasi dilakukan pengolahan hasil (sortiran, pengolahan, pengepakan, pemberian label, dan penyimpanan) sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar. Koperasi juga berperan sebagai media informasi pasar, apakah menyangkut dengan peluang pasar, perkembangan harga, dan daya beli pasar. Melalui informasi pasar koperasi harus dapat menciptakan peluang pasar produk-produk pertanian, sehingga petani tidak ragu untuk melakukan kegiatan usaha tani mereka karena ada jaminan dari koperasi bahwa produk mereka akan ditampung. Kegiatan ini akan merangsang partisipasi anggota terhadap koperasi, yang pada hakikatnya terjadi kesinambungan usaha koperasi.

Koperasi juga berperan sebagai penyedia kredit yang diperoleh dari lembaga perkreditan dan pengusaha. Pemberian kredit ini didasarkan kepada bentuk usaha pertanian yang mengembangkan komoditi unggulan dan punya peluang pasar. Tingkat pengembalian kredit oleh petani dapat dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil pertanian kepada koperasi.

Selain yang diungkapkan di atas, koperasi juga berfungsi sebagai: *Pertama*, mencarikan alternatif pemecahan masalah pertanian seperti penyediaan kredit, pembentukan modal bersama melalui tabungan, penyediaan sarana produksi, pengendalian hama terpadu, pelaku agroindustri, memasarkan produk pertanian dan sebagainya; *Kedua*, memberikan kemudahan berupa pelatihan dan pembinaan kepada petani dalam usaha-usaha yang dilakukannya; dan *ketiga*, petani perlu diorganisir untuk memperkuat posisi tawar-menawarnya dalam menghadapi persaingan dan melakukan kemitraan dengan pihak lain.

Dalam era globalisasi pada saat ini dan masa-masa mendatang untuk menyongsong liberalisasi perdagangan peranan pemerintah makin kecil, bahkan kebijaksanaan pajak impor dan subsidi akan dihapuskan bila sampai waktunya. Dengan demikian peranserta pihak swasta, yaitu perusahaan-perusahaan besar sangat diperlukan untuk mengisi dan melengkapi berbagai program pemerintah. Pihak pengusaha yang berada pada posisi yang kuat dapat membantu petani

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

pada posisi yang lemah dalam bentuk jaringan kemitraan. Hubungan ini dapat memberikan keuntungan kepada petani, yaitu: *Pertama*, transfer teknologi dan penyediaan masukan sehingga petani mampu bersaing dengan produk lain yang dihasilkan dengan menggunakan masukan dan teknologi yang lebih unggul; *Kedua*, dapat memperoleh informasi dan peluang pasar secara cepat; *Ketiga*, dapat membuka akses terhadap modal dan pasar; dan *keempat,* adanya jaminan dan kepastian pasar bagi produk pertanian (Almasdi Syahza, 2003a).

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/